



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45 / 204 / KPTS-BUP / 2022

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta guna mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya, perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Informasi publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;

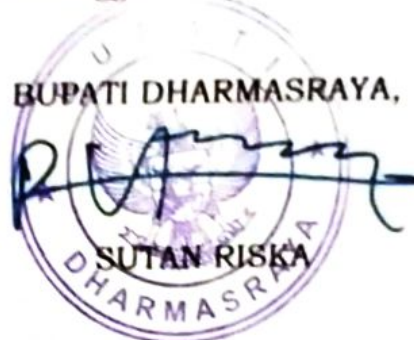
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Daftar Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan berdasarkan pengklasifikasian informasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Dharmasraya yang telah melalui proses Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 diumumkan pada www.ppido.dharmasrayakab.go.id sebagai halaman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharma Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Agustus 2022



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung;
4. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Agustus 2022

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	INSTANSI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	AKIBAT BILA DITUTUP
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Internet Protocol/IP Adress Private, Bandwidth Management, Sistem Management Database	Dinas Komunikasi dan Informatika	Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama masih digunakan	Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
2.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan notulasi hasil rapat Badan Pertumbuhan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h dan i	Sampai hasil Baperjakat ditindaklanjuti	Merugikan Proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di Lingkungan kerja
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf h	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
4.	Biodata elektronik dan non elektronik PNS (database)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
5.	Daftar Nilai Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang kepegawaian 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf i	1 (satu) Tahun	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
6.	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah Korupsi
7.	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Menimbulkan Penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
8.	Soal Test CPNS		UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
9.	Daftar Pejabat yang akan dilantik		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/ Pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
10.	Surat Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) beserta lampirannya	Seluruh OPD	1. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	INSTANSI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	AKIBAT BILA DITUTUP
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			4. Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1 dan 2)			
11.	Hasil rekam medik PNS/ Pejabat	RSUD	1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 2. Undang-undang No 36 Tahun tentang kesehatan	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
12.	Proses sertifikasi mutu dan uji mutu dan tanaman dan pupuk	Dinas Pangan Dan Perikanan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu proses analisis mutu	Tidak dapat mengganggu analisis mutu
13.	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Dinas Pangan Dan Perikanan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b	Setelah proses dilepas	Kemungkinan bisa dilepas oleh pihak lain	
14.	Usulan Sertifikasi Kebun	Dinas Pertanian	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b	Setelah Sertifikat Keluar	Dapat mengganggu proses sertifikasi	
15.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Bagian pengadaan barang dan jasa	1. Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 2. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b, i dan j	Sampai diketahuai pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
16.	Identitas wajib uji KIR	Dinas perhubungan	1. Undang-undang No 22 tahun 2009 tetang LLAJ 2. Permenhub 133 Tahun 2015 tentang PBKB	Tidak terbatas	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	
17.	Hasil Detail Engineering Design (DED)	Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Peraturan pengadaan barang/jasa	2 (dua) Tahun	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan Bidang Usaha serta menghindari kesalahpahaman informasi dimata publik
18.	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	Seluruh OPD	Perpres No 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada BAB IV Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagian kelima Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan pasal 23 ayat (1) hasil pengawasan oleh dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayat (2) laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain Sesuai dengan ketentuan	Tidak Ada Batas Waktu	Bocornya Rahasia Negara ke Publik	Kerahasiaan Negara Terjaga

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	INSTANSI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	AKIBAT BILA DITUTUP
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			peraturan perundang-undangan			
19.	Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kePala Daerah oleh Penyidik PNS		Pasal 322 ayat 1 dan 2 KUHP	Tidak Ada Batas Waktu	Melanggar Dasar Hukum	Kerahasiaan terjaga
20.	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan	Badan Keuangan Daerah	1 Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Negara 2 Perda No. 12 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun 2020 3 Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun 2019	Tiap Bulan	Mengungkapkan data keuangan pada tiap-tiap OPD	Menjaga kerahasiaan keuangan pada tiap-tiap OPD
21.	Proses pengajuan pendaftaran Hak Asasi Kekayaan Intelektual (HAKI)		1 UU No. 7/ 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO) 2 UU No. 14/1997 tentang hak cipta	Tiap Bulan	Mengungkapkan data harta yang dimiliki oleh ASN	Terlindungi dari pemeriksaan
22.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dalam proses dijatuhi hukuman disiplin karena tindak pidana Korupsi kasus dan Indisipliner		1 PP No. 11/2017 tentang Kepegawaian 2 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai turunnnya hukuman penjatuhannya disiplin	Dapat mengganggu Objektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga Objektivitas Putusan
23.	Data Pribadi klien bantuan hukum		UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Pelanggaran HAM (terkait asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi
24.	Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 3	Sampai dengan pengesahan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya	Mengungkap rahasia pribadi tentang Keuangan dan Aset seseorang	Melindungi hak pribadi
25.	Data Penderita HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan atau kekawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah
26.	Data Identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Dinas Sosial	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
27.	Informasi penerima Dana Hibah Partai Politik Kabupaten Dharmasraya	Kantor Kesbangpol	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Tidak terbatas		
28.	Informasi tentang data nama pengikut ajaran Negara Islam	Kantor Kesbangpol	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Atas ijin yang bersangkutan		

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	INSTANSI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	AKIBAT BILA DITUTUP
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Informasi jumlah pengaduan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Tidak terbatas		
30.	Informasi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan izin lingkungan dan izin RPPLH-nya oleh Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Tidak terbatas		
31.	Data hasil pemeriksaan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat	Dinas Kesehatan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Atas ijin yang bersangkutan		
32.	Data status kesehatan keluarga	Dinas Kesehatan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Atas ijin yang bersangkutan		
33.	Hasil pemeriksaan sampel depot air minum dan survey kualitas air minum rumah tangga	Dinas Kesehatan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Atas ijin yang bersangkutan		
34.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1 Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 2 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf b, i dan j	Sampai proses selesai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
35.	Data penduduk personal by name by address	Dinas kependudukan dan catatan sipil	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E